
ANALISIS PERMASALAHAN PENGEMBALIAN BANTUAN MODAL KERJA BERGULIR DENGAN METODE ZOPP: STUDI KASUS DI BKM BERKAH MULYO, YOGYAKARTA

Arief Fahmie

Universitas Islam Indonesia

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan bantuan modal kerja bergulir di BKM Berkah Mulyo Yogyakarta dengan menggunakan metode ZOPP (Ziel Orientierte Project Planung = Perencanaan Proyek Beorientasi pada Tujuan) sehingga dapat diupayakan langkah-langkah penyelesaiannya.

Berdasarkan data penelitian maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor situasional, institusional, dan individual. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa intervensi yang dapat dilakukan adalah survey di KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan Pelatihan motivasi dan ketrampilan wirausaha, kewajiban mengikuti pelatihan bagi KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja, dan perbaikan susunan pengurus.

Kata Kunci: Bantuan modal kerja bergulir, peran, ZOPP

PENDAHULUAN

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dimulai sejak Pelita I dan menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya tersebut telah menghasilkan perkembangan yang positif tetapi krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1996 telah menghapus usaha-usaha pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Krisis tersebut telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 22,5 juta atau 11 persen terhadap total penduduk sebelum krisis (tahun 1996) menjadi 49,4 juta atau 24

persen pada puncak krisis (tahun 1998). Dengan berbagai upaya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,5 juta (18 persen) pada Agustus 1999 dan diperkirakan menjadi 32,8 juta (16 persen) pada Februari 2000 (Kedaulatan Rakyat, 2001).

Menurut Coleman dan Cressey (1987) dalam 50 tahun terakhir kemiskinan dipandang sebagai masalah institusional daripada masalah personal. Di perkotaan, dilaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Tujuan P2KP adalah membiayai

kegiatan-kegiatan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan sasaran, melalui (1) Bantuan modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan (2) Hibah bagi pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

P2KP menganut pendekatan pemberdayaan sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut HS Dillon selaku Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK), tugas utama BKPK adalah mengembangkan diskursus setara untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, orop, perguruan tinggi, lembaga eksekutif dan legislatif untuk menerapkan paradigma baru yaitu saatnya menempatkan si miskin menjadi aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri (Kedaulatan Rakyat, 2001).

P2KP mengalokasikan dana untuk kelurahan berupa hibah bervariasi menurut ukuran kelurahan. Untuk memastikan adanya keterbukaan di tingkat kelurahan, kepada masyarakat akan diumumkan jumlah maksimum bantuan per RW sekitar Rp 100.000,00 dengan catatan tiap RW tidak dengan sendirinya akan mendapatkan seluruh dana dimaksud. Bagi kelurahan yang kemajuan pelaksanaannya rendah selama enam bulan pertama, hak mendapat bantuan dapat dialihkan ke kelurahan lain. Tiap kelurahan akan mendapat bantuan satu kali selama proyek berjalan.

Dana dari P2KP dapat digunakan untuk kredit bagi kegiatan ekonomi berkelanjutan dan hibah untuk pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, tergantung pada prioritas kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat setempat. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pertanian kota, pelatihan bagi kelompok produktif,

pembelian alat-alat kerja (mesin jahit, komputer, dan lain-lain), atau pembangunan/perbaikan perumahan bertumpu pada masyarakat yang masa pengerjaannya tidak lebih dari satu tahun.

Pada tahap pertama, lokasi sasaran P2KP terdiri dari 57 daerah tingkat (Dati) II di wilayah utara, ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten dan Kota Malang. Wilayah ini dipilih karena merupakan kawasan perkotaan yang padat dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar. Di DIY terdapat 5 kelurahan sasaran di Kabupaten Kulon Progo, 13 kelurahan sasaran di Kabupaten Bantul, 9 kelurahan sasaran di Kabupaten Gunung Kidul, 12 kelurahan sasaran di Kabupaten Sleman, dan 14 kelurahan sasaran di Kotamadya Yogyakarta.

Kelurahan Pakuncen merupakan salah satu kelurahan yang diberi dana dalam pelaksanaan P2KP dengan alokasi dana pada Tahap I sebesar Rp 250.000.00. Kelurahan Pakuncen terletak di Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY dengan luas wilayah 64.933 Ha yang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tegalgrejo, Kota Yogyakarta, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Penduduk di Kelurahan Pakuncen berjumlah 11.638 jiwa yang tersebar di 56 rukun tetangga (RT) dan 12 rukun warga (RW) (Data Monografi Juli-Desember 2000).

Sebagai prasyarat bagi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di kelurahan tersebut, maka dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Berkah Mulyo pada tanggal 13 Maret 2000 dengan

akta pendirian nomer 04 tanggal 13 Maret 2001 dengan notaris Gelis Rahmat Joko Pradopo, SH, S.Sos. BKM Berkah Mulyo pada awalnya berkantor di Kantor Kelurahan Pakuncen lalu pindah di Jl. Ngadimulyo No. 16, Pakuncen, Yogyakarta.

Perorangan dan keluarga miskin yang berdomisili di kelurahan tersebut didorong untuk menghimpun dirinya ke dalam suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM merupakan target penerima bantuan P2KP yang sesungguhnya. KSM penerima bantuan P2KP harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut (Buku Satu: Pedoman Umum, 1999):

1. Beranggotakan minimal 3 orang (dari rumah tangga yang berbeda).
2. Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan bersama antara lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya.
3. Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki ketrampilan tertentu yang dibutuhkan), dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM.

Perkembangan P2KP di Kelurahan Pakuncen menunjukkan perkembangan yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jumlah KSM maupun bantuan modal kerja bergulir yang terus bertambah. Dana yang bergulir sampai dengan 21 Juni 2001 adalah Rp 438.250.000,00. Di samping itu selama pelaksanaan P2KP, BKM Berkah Mulyo telah mengumpulkan dana sejumlah Rp 22.000.000,00 dari bunga bantuan modal kerja bergulir anggota KSM.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P2KP adalah masih terdapat anggota KSM yang belum lancar dalam mengembalikan bantuan modal kerja bergulir. Pengurus BKM Berkah Mulyo

membagi pengembalian bantuan modal kerja bergulir dalam 3 kategori, yaitu lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Bantuan lancar adalah bantuan yang dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Bantuan modal kerja bergulir yang kurang lancar berarti bantuan modal kerja bergulir tersebut dapat dikembalikan setelah dijadwal ulang, sedangkan bantuan modal kerja bergulir tidak lancar berarti tidak dapat dikembalikan namun tetap dilakukan penagihan. Jumlah dana yang tergolong dalam pengembalian bantuan modal kerja bergulir yang kurang lancar dan tidak lancar adalah Rp 20.000.000,00. Hal ini tentu saja menghambat upaya pengentasan kemiskinan karena dana tersebut merupakan bantuan modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, artinya bila terdapat anggota KSM yang kurang atau tidak lancar dalam mengembalikan bantuan modal kerja bergulirnya maka akan ada masyarakat lain yang tertunda kesempatannya mendapat bantuan modal kerja.

Di sisi lain, keberadaan BKM bukanlah semata-mata lembaga keuangan untuk peminjaman uang seperti bank pada umumnya tetapi merupakan lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya atau dengan kata lain mengemban misi pemberdayaan. Oleh sebab itu bila terdapat kekuranglancaran dalam pengembalian bantuan modal kerja bergulir berarti usaha pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Permasalahan kurang lancarnya pengembalian bantuan modal kerja bergulir dapat dianalisis dengan melihat peran pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) dalam P2KP, yaitu KSM, BKM, masyarakat, aparat RT, RW, dan kelurahan, dan fasilitator kelurahan. Hubungan peran antar pihak-pihak terkait, pengaruh peran suatu

pihak terhadap pihak lain, serta kepentingan dasar dari pihak-pihak tersebut memiliki dinamika sosial tersendiri. Hal ini disebabkan pelaksanaan P2KP membentuk suatu struktur sosial yang memiliki dinamika tertentu. Dinamika sosial ini mempengaruhi perilaku pihak-pihak terkait berdasar peran yang dimilikinya, termasuk perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pengembalian bantuan modal kerja bergulir. Permasalahan kekuranglancaran pengembalian bantuan modal kerja bergulir perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengembangkan rancangan penyelesaian yang jelas dan realistis dengan melihat dinamika sosial yang terjadi dan berdasarkan peran dari pihak-pihak terkait.

TELAAH PUSTAKA

1. Peran dalam Suatu Sistem Sosial

Kehidupan manusia dalam suatu sistem sosial mempunyai konsekuensi tertentu, yaitu keberadaan seseorang dalam kelompoknya. Hal ini membuat perilakunya tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan peran yang dimainkan dan kehadiran orang lain yang berhubungan dengan peran tersebut. Michener (dalam Michener dan DeLamater, 1999) menyatakan bahwa peran adalah seperangkat fungsi yang dibentuk anggota untuk kelompoknya. Fungsi tersebut berbentuk perilaku yang dikarakteristikkan melalui pengenalan kembali seseorang dalam konteks tertentu. Konsep dari Teori Peran mempelajari perilaku yang dicirikan dari orang yang "beraksi", sehingga disebut aktor, dengan peran tertentu dalam sistem sosial tertentu.

Preposisi dalam Teori Peran adalah sebagai berikut (Michener dan DeLamater, 1999):

1. Manusia menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya dengan berpartisipasi

sebagai anggota kelompok dan organisasi.

2. Dalam kelompok tersebut, manusia menduduki posisi-posisi yang berbeda.
3. Setiap posisi-posisi tersebut memerlukan suatu peran, yaitu seperangkat fungsi yang dikerjakan oleh seseorang untuk kelompoknya. Peran seseorang dibentuk oleh harapan-harapan (yang berasal dari anggota yang lain dari kelompok) yang mengarahkan perilaku orang tersebut.
4. Kelompok-kelompok sering memformalkan harapan-harapan ini sebagai norma, di mana peraturan-peraturan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, keuntungan yang akan diperoleh bila berperilaku yang sesuai dengan norma, dan hukuman yang akan diterima bila melakukan berperilaku yang sesuai dengan norma.
5. Jika seseorang bertemu dengan harapan-harapan dari orang lain, lalu dia akan menerima penghargaan dalam beberapa bentuk (penerimaan, persetujuan, uang, dan sebagainya). Jika dia gagal berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, anggota kelompok akan mempermalukan, menghukum, atau bahkan mengeluarkan individu dari kelompok. Linton (dalam Stepan dan Stepan, 1985) membagi peran menjadi 2 tipe, yaitu peran yang diusahakan dan peran yang langsung diperoleh. Peran yang diusahakan memerlukan kemampuan atau pelatihan tertentu, misalnya guru, ketua, dan sebagainya. Peran yang langsung diperoleh biasanya berhubungan dengan peran seksual, misalnya anak perempuan, sepupu, dan sebagainya.

Michener (dalam Michener dan DeLamater, 1999) menyatakan bahwa peran bukan hanya seperangkat aturan-aturan

yang berfungsi sebagai suatu kerangka acuan dan panduan dalam berperilaku, tetapi juga menunjukkan tujuan-tujuan yang akan dicapai, tugas-tugas yang harus dilakukan, dan kinerja yang harus ditunjukkan.

Biddle dan Thomas (dalam Shaw dan Costanzo, 1982) menyatakan bahwa terdapat 5 konsep yang berhubungan dengan perilaku dalam Teori Peran yaitu:

1. Harapan, yaitu harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas yang ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.
2. Norma, yaitu salah satu bentuk harapan yang bersifat meramalkan dan harapan normatif (Secord dan Backman dalam Shaw dan Costanzo, 1982). Harapan normatif dikelompokkan menjadi harapan yang terselubung dan harapan yang terbuka.
3. Wujud perilaku. Wujud perilaku dari peran dapat ditinjau dari intensitasnya. Tingkat terendah adalah di mana aktor sangat tidak terlibat sedang tingkat tertinggi apabila aktor melibatkan seluruh pribadinya, sedangkan intensitasnya dapat dinyatakan dengan tingkat permukaan dan tingkat yang tidak sampai permukaan.
4. Penilaian dan sanksi. Penilaian dan sanksi agak sulit untuk dibedakan. Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Kesan positif dan negatif terhadap norma disebut penilaian, dan usaha orang untuk mempertahankan nilai positif dan negatif disebut sanksi.

2. Peran dan Perubahan Perilaku

Menurut Myers (1990), Teori Peran menekankan pada perilaku peran dan perubahan sikap yang merupakan hasil dari penerapan peran-peran. Peran seseorang tidak hanya menentukan perilaku tetapi juga

kepercayaan dan sikap. Teori Peran berasumsi bahwa manusia pada umumnya konformis. Masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan-harapan peran yang diadakan oleh anggota kelompok. Walaupun demikian, harapan dari orang lain biasanya memberi ruang untuk memperbaiki perilaku sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah pembuat peran-peran yang membentuk mereka dan tidak sekedar terjadi konformitas yang pasif terhadap harapan-harapan.

Untuk mengubah perilaku seseorang, maka harus mengubah peran yang dimiliki. Perubahan perilaku akan tampak jika seseorang bertukar peran karena peran yang baru memerlukan perbedaan harapan dan permintaan (Michener dan DeLamater, 1999). Berperan yang lain dapat pula dilakukan dengan pengambilan peran, yaitu proses yang secara imajinatif menduduki posisi orang lain dan memandang diri dan bentuk-bentuk situasi sesuai dengan perspektif peran tersebut (Hewitt dalam Shaw dan Costanzo, 1982).

Cara lain untuk mengubah perilaku seseorang adalah mengubah atau menegaskan kembali perannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah harapan-harapan dari perannya atau memindahkan orang tersebut dalam peran yang berbeda (Allen dan Van de Vliert dalam Michener dan DeLamater, 1999).

3. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah satu kesatuan anggota dan persatuan para anggota. KSM merupakan milik anggota dan dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama dari para anggota dan mengembangkan usaha-usaha bersama dari masing-masing anggotanya. Dengan bergabung dalam KSM, masing-masing anggota diharapkan dapat menggalang potensi diri, baik berupa uang, pikiran, cita-

cita maupun tenaga (Hidayat dalam Ramdhani, 1996).

KSM hampir sama dengan *self-help group*. Napier dan dan Gershenfield dalam Ramdhani (1996) mengemukakan bahwa *self-help group* adalah kelompok sukarela yang berkumpul untuk tukar menukar pengalaman tentang kebutuhan mereka dan masalah yang dihadapi. Biasanya *self-help group* ini terdiri dari orang-orang yang merasa tidak berdaya karena mengalami kesulitan keuangan, menderita penyakit yang sulit bahkan belum bisa disembuhkan, dan sebab-sebab lain yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan.

Menurut Yalom (dalam Ramdhani, 1996), individu dalam kelompoknya dapat merasakan universalitas. Dalam diri masing-masing anggota timbul kesadaran bahwa yang mengalami kekurangan bukan hanya mereka sendiri. Ada orang lain juga yang mengalami hal serupa. Perasaan menjadi "kecil" sebagai akibat himpitan ekonomi sebagai masyarakat miskin, sedikit demi sedikit berkurang, karena ternyata masih ada orang lain dengan keadaan sama. Dalam kelompok, individu dapat menjadi berani berbuat, karena ada perasaan sama rasa di antara anggotanya. Dalam kelompok, juga terdapat tukar menukar pengalaman atau *sharing* mengenai kiat-kiat mengatasi masalah yang biasanya menjadi fokus *self-help group*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk menganalisis permasalahan digunakan metode ZOPP (*Ziel Orientierte Project Planung* = Perencanaan Proyek Berorientasi pada Tujuan) atau GOPP (*Goal Oriented Project Planning*) atau Perencanaan Proyek Berorientasi pada Tujuan. Metode ini dikenal sebagai metode

perencanaan sejak tahap mendeskripsikan gejala sampai dengan pelaksanaan program intervensi (Sucipto, 1999). Pendekatan ini memberikan cara yang sistematis untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan proyek dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait (<http://www.mit.edu>, 2001).

Alat-alat kelengkapan metode ZOPP adalah:

1. Analisis Keadaan, yang terdiri dari:
 - a. Analisis Permasalahan, yang bertujuan untuk memilih satu masalah inti dan menunjukkan semua hubungan sebab-akibat yang berkaitan dengan masalah inti tersebut.
 - b. Analisis Tujuan, yang bertujuan untuk menentukan keadaan yang diinginkan (tujuan) dan menunjukkan hubungan tindakan-hasil yang utama dan langsung.
 - c. Analisis Alternatif, yang bertujuan menelaah dan memilih beberapa alternatif tindakan intervensi (proyek) dengan menggunakan kriteria tertentu.
 - d. Analisis Peran, yang bertujuan menelaah peran dari pihak-pihak yang terkait dalam hubungannya dengan pelaksanaan intervensi.
 2. Rancangan Proyek, yang bertujuan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan intervensi yang akan dilakukan, meliputi tujuan, maksud dan sasaran, asumsi-asumsi penting, indikator objektif sekaligus sumber pembuktiannya, kegiatan, sarana dan biaya yang diperlukan.
- Sucipto (1999), mengungkapkan bahwa penerapan ZOPP sebagai metode untuk menganalisis suatu permasalahan dapat berguna untuk:
1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang

berkait melalui perencanaan bersama dan dokumentasi semua tahap perencanaan.

2. Mencapai pengertian yang sama dan menghasilkan definisi yang jelas mengenai keadaan yang ingin diperbaiki dengan proyek.
3. Merumuskan definisi yang jelas dan realistis tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
4. Menghasilkan rencana proyek sebagai landasan kerjasama untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek.

HASIL PENELITIAN

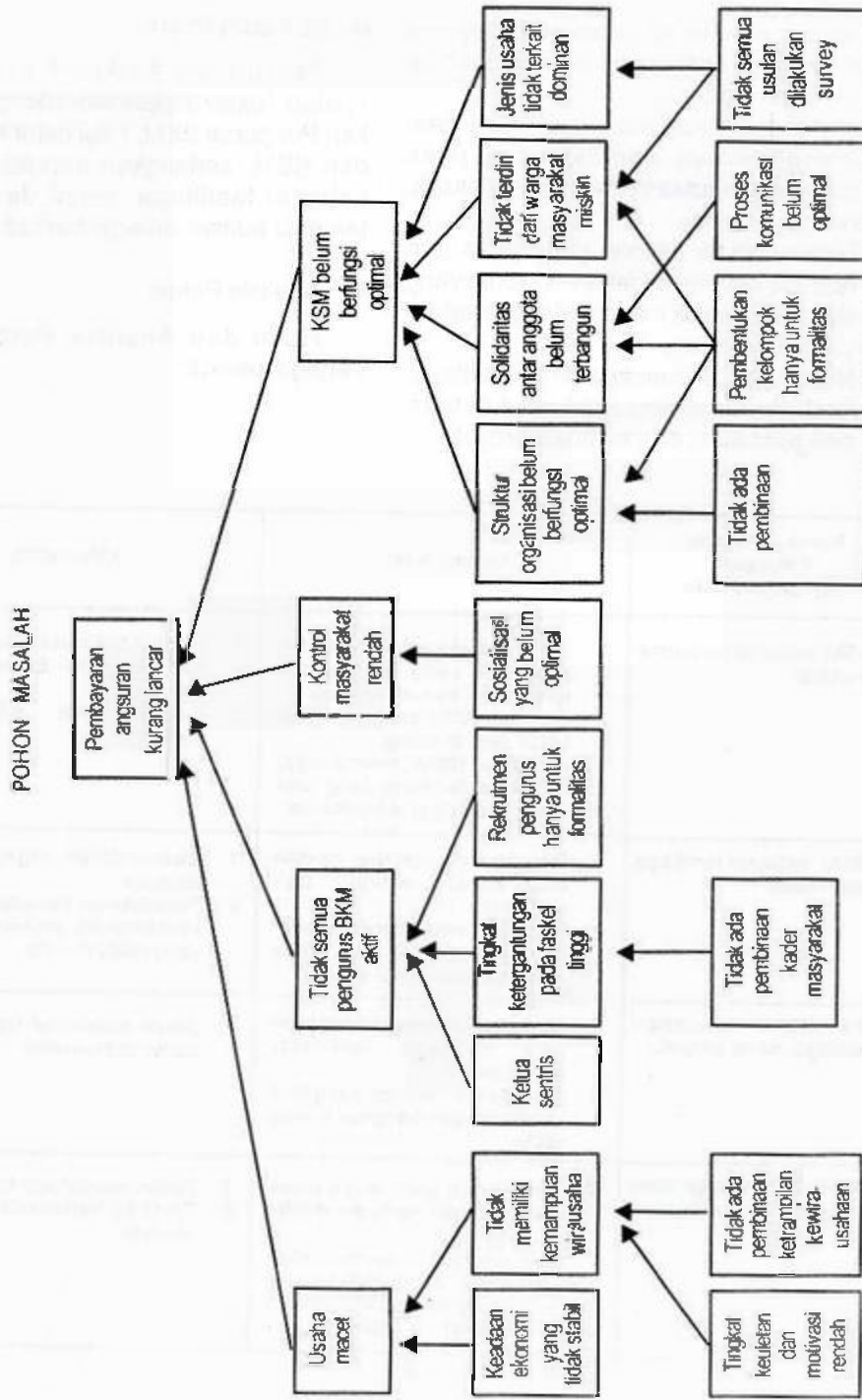
Penyusunan Analisis Permasalahan, Analisis Tujuan dilaksanakan dengan melibatkan Pengurus BKM, Fasilitator Kelurahan, dan KSM, sedangkan penulis bertindak sebagai fasilitator. Hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Peran.

Hasil dari Analisis Peran adalah sebagai berikut:

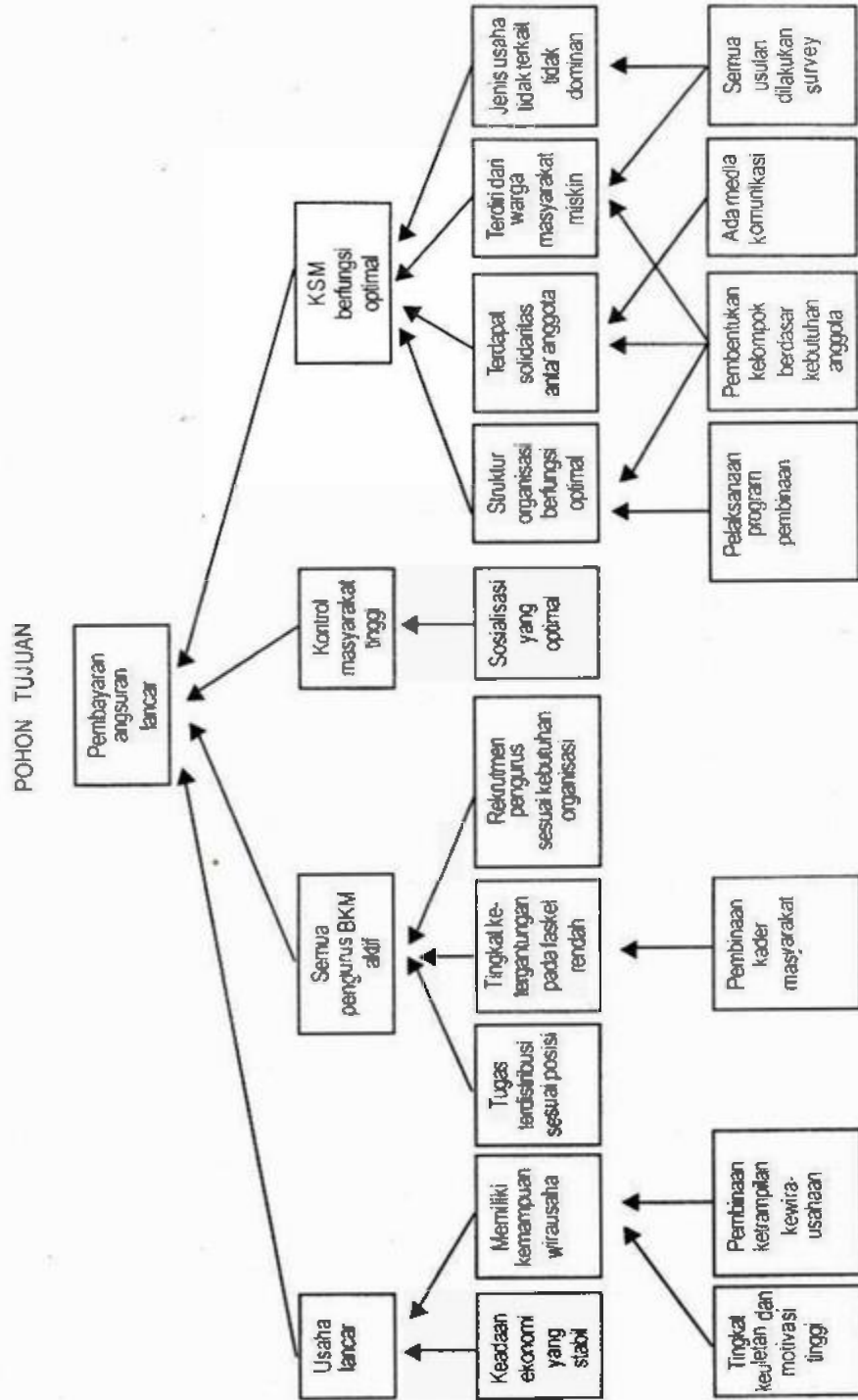
Nama Lembaga/ Kelompok dan Jenis Peran	Kemampuan	Kelemahan
KSM sebagai penerima manfaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai jumlah anggota dan kelompok yang banyak dan tersebar di semua wilayah. 2. Terdapat KSM yang potensial untuk berkembang. 3. Anggota KSM mempunyai akses komunikasi yang baik karena berada di wilayah kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model KSM masih individual. 2. Konsep P2KP belum dipahami dengan baik. 3. Kelembagaan KSM belum berfungsi.
BKM sebagai lembaga pelaksana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus mengetahui dengan baik kondisi wilayah dan warganya. 2. Konsep-konsep pengembangan telah disiapkan oleh Ketua dan Fasilitator Kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dalam organisasi belum berjalan. 2. Pemahaman terhadap P2KP dan kemampuan personil pengurus yang tidak merata.
Fasilitator kelurahan sebagai mitra proyek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada fasilitator sebelumnya. 2. Mempunyai dedikasi yang baik untuk mengembangkan kinerja BKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan transfer kepada kader masyarakat.
Masyarakat sebagai mitra proyek dan penerima manfaat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antusiasme yang tinggi untuk memperoleh bantuan modal kerja bergulir. 2. Merupakan masyarakat perkotaan yang mempunyai potensi untuk memberikan pengawasan sistemik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memahami konsep P2KP. 2. Tingkat kepeduliannya masih rendah.

2. Analisis Permasalahan.
 Hasil dari Analisis Permasalahan ditunjukkan dengan Pohon Masalah berikut:



3. Analisis Tujuan

Hasil dari Analisis Tujuan ditunjukkan dengan Pohon Tujuan berikut:



Berdasarkan Analisis Masalah dan Analisis Tujuan, kekuranglancaran pengembalian bantuan modal kerja bergulir oleh KSM di BKM Berkah Mulyo merupakan suatu dinamika sosial yang melibatkan 3 faktor yaitu faktor situasional, institusional, dan individual. Faktor situasional yang mempengaruhi adalah faktor kondisi perekonomian yang tidak menentu. Faktor institusional yang mempengaruhi adalah KSM, BKM, Fasilitator Kelurahan, dan masyarakat. Faktor individual yang mempengaruhi adalah kondisi anggota KSM. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan saling mempengaruhi.

Faktor situasional berupa kondisi perekonomian yang tidak dapat diprediksi menyebabkan usaha produktif para anggota KSM tidak dapat dilanjutkan lagi. Di sisi lain, faktor individual anggota KSM khususnya kemampuan wirausaha dari anggota KSM yang masih perlu terus ditingkatkan. Keterampilan wirausaha yang rendah tersebut disebabkan tingkat keuletan dan motivasi yang rendah, dan dipengaruhi faktor institusional yaitu tidak ada pembinaan dari BKM, khususnya Pokja Penguatan Kelembagaan KSM.

Pengembalian bantuan modal kerja bergulir yang kurang lancar juga disebabkan tidak semua pengurus BKM yang tersusun dalam struktur organisasi aktif menjalankan perannya dengan optimal sesuai dengan deskripsi kerjanya. Faktor institusional ini dapat disebabkan tugas-tugas organisasi sebagian besar dilaksanakan oleh ketua (Ketua sentris), tingkat ketergantungan pada faskel yang tinggi, dan perekrutan pengurus yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan agar proses pembentukan BKM dapat dilaksanakan. Ketergantungan pada faskel tinggi disebabkan oleh belum adanya pembinaan kader masyarakat sehingga nantinya peran faskel dapat digantikan oleh kader masyarakat tersebut.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap Program P2KP, baik visi, misi, aktivitas, maupun dengan aktivitas organisasional dari lembaga yang berkaitan dengan P2KP dapat digolongkan rendah. Hal ini utamanya disebabkan dengan proses sosialisasi yang belum optimal, baik kuantitas maupun kualitas. Masyarakat belum dapat berperan sebagai fungsi kontrol sosial dengan menjalankan pengawasan secara sistemik.

Institusi lain yang belum menjalankan perannya dengan baik adalah Kelompok Swadaya Masyarakat. Hal ini disebabkan oleh struktur organisasi KSM walaupun sudah ada tapi belum baik, kebersamaan yang belum terbangun, dan jenis usaha anggota KSM bersifat aneka usaha tidak terkait yang dominan.

Masalah struktur organisasi yang belum berfungsi optimal berkaitan dengan tidak ada pembinaan dari BKM dan pembentukan kelompok sekedar untuk formalitas. Sebenarnya secara formal struktur KSM yang terdiri dari ketua dan anggota telah ada namun karena hanya untuk persyaratan administratif saja dan Pokja Penguatan Kelembagaan KSM tidak memberikan pembinaan lebih lanjut. Peran institusi KSM dan BKM sebenarnya memberikan kontribusi yang besar dalam faktor ini. Fasilitator Kelurahan dan BKM, khususnya Pokja Sosialisasi Kebijakan BKM mempunyai peran yang signifikan.

Masalah kebersamaan anggota berkaitan dengan proses komunikasi yang belum optimal dan pembentukan kelompok untuk formalitas. Kebersamaan tidak dapat terbangun karena komunikasi hanya terjadi ketika sosialisasi dan proses pencairan bantuan modal kerja. Setelah itu komunikasi dilakukan dengan media buletin. Hal ini tentu saja belum cukup untuk membangun kebersamaan atau dalam P2KP diterapkan dalam prinsip tanggung renteng.

Masalah komposisi anggota berkaitan dengan proses pembentukan kelompok untuk formalitas dan tidak semua usulan dilakukan survey. Hal ini terlihat dalam kondisi ekonomi anggota KSM yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I tapi sebenarnya telah layak untuk mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan (*bankable*).

Masalah jenis usaha tidak terkait yang dominan berkaitan dengan tidak semua usulan dilakukan survey. Bila dilakukan survey dapat membantu mengarahkan KSM agar kelompok yang individual, karena jenis usaha tidak terkait, diubah komposisi keanggotaan agar kelompok yang jenis usahanya berkaitan dapat bergabung dalam satu kelompok. Pelaksanaan survey merupakan salah peran yang harus dilaksanakan oleh Fasilitator Kelurahan dan Ketua BKM.

PEMBAHASAN

Dinamika sosial yang terjadi dalam permasalahan kekuranglancaran pengembalian bantuan modal kerja bergulir oleh KSM di BKM Berkah Mulyo dapat dianalisis dari peran-peran yang dimainkan oleh pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam preposisi dalam Teori Peran (Michener dan DeLamater, 1999) bahwa dalam kehidupan sosialnya manusia menduduki posisi-posisi tertentu yang memerlukan suatu peran. Kehidupan sosial yang dibentuk dalam pelaksanaan P2KP menyebabkan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya menempati posisi-posisi tertentu yang memerlukan peran-peran tertentu pula.

Peran sebagai anggota KSM, KSM, BKM, Fasilitator Kelurahan, dan masyarakat memberikan suatu kerangka acuan dan panduan dalam berperilaku bahkan menunjukkan tujuan-tujuan yang akan dioapai, tugas-tugas yang harus dilakukan,

dan kinerja yang harus ditunjukkan (Michener dalam Michener dan DeLamater, 1999). Peran sebagai KSM, misalnya, mengharuskan berperilaku mampu berwirausaha, mampu mengembalikan bantuan modal kerja tepat waktu, dapat bekerjasama dengan anggota yang lain, dan sebagainya. Keharusan berperilaku tersebut merupakan harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai peran tertentu (Biddle dan Thomas dalam Shaw dan Costanzo, 1982). Harapan-harapan dalam konteks permasalahan pengembalian bantuan modal kerja bergulir dapat dicermati lebih lanjut dalam Analisis Tujuan yang menghasilkan Pohon Tujuan.

Suatu peran menunjukkan wujud perilaku dalam intensitas tertentu, apakah orang atau kelompok tersebut terlibat secara penuh atau tidak. Bila wujud perilakunya sesuai dengan harapan yang diinginkan maka dia akan menerima penghargaan tetapi bila gagal maka akan menerima hukuman (Michener dan DeLamater, 1999). Peran BKM, sebagai contoh, mengharuskan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, misalnya melakukan monitoring, komunikasi dengan KSM, mengadakan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat, dan sebagainya. Bila yang berangkutan dapat berperilaku seperti harapan tersebut maka akan menerima penghargaan misalnya uang insentif, dinyatakan pengurus yang aktif, berjasa mengentaskan kemiskinan, dan sebagainya tetapi bila gagal maka akan menerima hukuman misalnya menjadi penyebab KSM tidak berkembang, tidak mendapat uang insentif, ditegur oleh Ketua BKM, dan sebagainya.

Kegagalan dalam berperilaku dilakukan pihak-pihak terkait seperti yang diharapkan menyebabkan pengembalian angsuran yang kurang lancar. Hal ini dapat dicermati dari

Pohon Masalah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan intervensi dengan 2 cara yaitu mengubah perannya dan menegaskan kembali perannya. Mengubah peran dapat dilakukan dengan bertukar peran karena peran yang baru mempunyai harapan yang lain pula (Michener dan DeLamater, 1999) atau melakukan pengambilan peran yaitu secara imajinatif menduduki peran yang lain (Hewitt dalam Shaw dan Costanzo, 1982). Menegaskan kembali perannya dilakukan dengan menegaskan harapan-harapan sehingga diharapkan dia akan mengubah perilakunya (Allen dan Van de Vliet dalam Michener dan DeLamater, 1999).

Dua intervensi seperti tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan berdasar pada Pohon Tujuan karena Pohon Tujuan merupakan harapan-harapan terhadap perilaku masing-masing peran. Mengubah peran dari individu atau kelompok yang terkait diharapkan akan melancarkan pengembalian modal kerja bergulir. Hal ini disebabkan dengan harapan-harapan yang baru, muncul perilaku-perilaku baru yang sesuai dengan harapan yang baru pula, misalnya Pengurus di suatu Pokja perlu dimutasi ke Pokja yang

lain yang lebih sesuai. Di samping itu, menegaskan kembali peran dari individu atau kelompok dapat pula dilakukan karena hal itu akan memberikan arahan bahwa perilakunya selama ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dan harus mengubahnya sesuai dengan yang diharapkan, misalnya anggota KSM yang usahanya macet karena tidak memiliki kemampuan wirausaha maka dari BKM diharuskan melakukan pembinaan ketrampilan kewirausahaan dan dari anggota KSM harus menunjukkan keuletan dan motivasi yang tinggi.

Setelah diperoleh Pohon Tujuan sebagai hasil dari analisis untuk menentukan keadaan yang diinginkan dan menunjukkan hubungan tindakan-hasil yang utama dan langsung, maka disusun Analisis Alternatif dan Rancangan yang hasilnya sebagai berikut:

1. Analisis Alternatif

Pemilihan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah kekuranglancaran pengembalian bantuan modal kerja bergulir dilakukan dengan Analisis Alternatif. Hasil analisis adalah sebagai berikut:

No.	Alternatif Intervensi	Kriteria							TOTAL
		Sarana yang tersedia	Waktu yang tersedia	Peluang keberhasilan	Sumbangan untuk usaha lain	Kesinambungan	Dampak terhadap lingkungan	Perbandingan keuntungan-biaya	
1	Sosialisasi kepada masyarakat	4	5	3	4	4	5	4	29
2	Pertemuan KSM dengan BKM	4	2	2	4	3	5	2	22
3	Perbaikan susunan pengurus	4	2	3	5	4	5	5	28
4	Pelatihan motivasi dan ketrampilan wirausaha	4	4	4	4	5	5	3	29
5	Survey di KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja	5	5	5	5	5	5	5	35
6	Persyaratan wajib mengikuti pelatihan bagi KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja	4	3	4	5	5	5	3	29
7	Pembinaan kader masyarakat	4	1	2	5	2	5	5	24

Interval skor untuk kriteria adalah 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan bahwa kriteria tersebut sangat tidak layak untuk pelaksanaan intervensi dan nilai 5 menunjukkan bahwa kriteria tersebut sangat layak untuk pelaksanaan intervensi. Intervensi yang dipilih minimal mempunyai total nilai 28 dan semakin tinggi total nilai maka intervensi tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Berdasar analisis di atas dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dapat dilakukan adalah:

1. Survey di KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja.
 2. Sosialisasi kepada masyarakat.
 3. Pelatihan motivasi dan ketrampilan wirausaha.
 4. Persyaratan wajib mengikuti pelatihan bagi KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja.
 5. Perbaikan susunan pengurus.
4. Rancangan Proyek
Pelaksanaan intervensi, yang telah ditentukan sebagai hasil dari Analisis Alternatif, dilaksanakan dengan menggunakan matriks perencanaan proyek sebagai berikut:

MATRIKS PERENCANAAN PROYEK 1			
NAMA PROYEK : Survey awal		JANGKA WAKTU: 2 hari tiap KSM	
TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Mengoptimalkan fungsi KSM	INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF: Setiap persetujuan permohonan bantuan modal kerja telah dilakukan survey terhadap anggota dan jenis usaha	SUMBER-SUMBER PEMBUKTIAN: Daftar Usulan Kegiatan yang layak	ASUMSI-ASUMSI PENTING: Dukungan aparat RT dan RW
SASARAN PROYEK: KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja	Setiap permohonan bantuan modal kerja telah memberikan data yang dibutuhkan	Formulir Usulan Kegiatan KSM dan Perhitungan Kelayakan Keuangan Usulan Kegiatan Usaha Produktif	Pemahaman pengisian formulir
MAKSUD PROYEK: Mengupayakan agar anggota terdiri dari masyarakat miskin. Jumlah jenis usaha terkait lebih banyak	Setiap pengajuan bantuan modal kerja telah dibahas kelayakannya	Berita Acara Pembahasan Prioritas Usulan Kegiatan	Tidak ada intervensi dari luar dalam pengambilan keputusan
HASIL-HASIL KERJA PROYEK: Anggota KSM terdiri dari masyarakat miskin. Jenis usaha terkait dominan	Setiap KSM paling banyak 1 orang yang bukan masyarakat miskin	Daftar Anggota KSM	Kejujuran anggota KSM
KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengecek ke tempat usaha	SARAN DAN BIAYA PROYEK		
	Formulir Uang insentif Fasilitator Kelurahan dan Pokja Monitoring dan Rencana Kerja		

MATRIKS PERENCANAAN PROYEK 2			
NAMA PROYEK : Sosialisasi		JANGKA WAKTU : 3 hari	
TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap P2KP	INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF: Terdapat persepsi positif terhadap P2KP	SUMBER-SUMBER PEMBUKTIAN: Hasil wawancara	ASUMSI-ASUMSI PENTING: Penerimaan masyarakat terhadap proyek sosialisasi
SASARAN PROYEK: Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Tercatat sebagai warga Pakuncen	Daftar warga Pakuncen	Dukungan aparat RT dan RW
MAKSUD PROYEK: Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang peran vital P2KP	Masyarakat telah menerima informasi dari P2KP dari BKM	Telah diadakan sosialisasi	Dukungan masyarakat
HASIL-HASIL KERJA PROYEK: Meningkatkan peran masyarakat sebagai fungsi kontrol	Masyarakat memberi masukan tentang pelaksanaan P2KP	Saran atau kritikan kepada BKM	Kesiapan masyarakat dalam memberikan saran dan kritik
KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam pertemuan-pertemuan warga	SARAN DAN BAYA PROYEK Penyaji materi sosialisasi Biaya konsumsi pertemuan Tempat pertemuan Bantuan pembangunan fisik		Program dari lembaga keuangan tingkat kelurahan

MATRIKS PERENCANAAN PROYEK 3			
NAMA PROYEK: Pelatihan Kewirausahaan		JANGKA WAKTU: 2 hari	
TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Meningkatkan ketrampilan wirausaha	INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF: Terdapat upaya meningkatkan kualitas berwirausaha	SUMBER-SUMBER PEMBUKTIAN: Laporan dari Pokja Monitoring	ASUMSI-ASUMSI PENTING:
SASARAN PROYEK: KSM di Berkah Mulyo	Tercatat sebagai anggota KSM di BKM Berkah Mulyo	Daftar KSM di BKM Berkah Mulyo	
MAKSUD PROYEK: Memberikan kemampuan untuk melihat peluang usaha dan administrasi keuangan	Mengikuti pelatihan	Daftar hadir	
HASIL-HASIL KERJA PROYEK: Mampu melihat peluang usaha dan melakukan admisnitrase keuangan sederhana	Menerapkan materi pelatihan	Laporan dari Pokja Penguatan Ketembagaan KSM	Minat peserta untuk menerapkan materi pelatihan
KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK Pelatihan tentang Peluang Usaha dan Administrasi Keuangan	SARAN DAN BIAYA PROYEK Tempat pelatihan Pemateri konsumsi		Kesulitan untuk menentukan waktu yang sesuai

MATRIKS PERENCANAAN PROYEK 4			
NAMA PROYEK : Wajib pelatihan bagi KSM baru		JANGKA WAKTU : 1 hari	
TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Membina KSM agar dapat memanfaatkan bantuan modal kerja	INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF: Terdapat persyaratan wajib mengikuti pelatihan bagi KSM baru	SUMBER-SUMBER PEMBUKTIAN: Prosedur Permohonan Bantuan Modal Kerja	ASUMSI-ASUMSI PENTING: Dorongan konsumtif
SASARAN PROYEK: KSM baru	Tercatat sebagai KSM yang akan mengajukan permohonan bantuan modal kerja	Rekapitulasi Usulan Kegiatan KSM	
MAKSUD PROYEK: Membenkan informasi tentang visi dan misi P2KP dan materi dasar kewirausahaan	Dilaksanakan pelatihan bagi KSM baru	Laporan Pokja Penguatan Kelembagaan KSM	
HASIL-HASIL KERJA PROYEK: KSM baru memperoleh informasi yang benar tentang P2KP dan bimbingan berwira-usaha	Mempunyai rencana dalam penggunaan bantuan modal kerja	Laporan Fasilitator Kelurahan	
KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK Membenkan pelatihan dan sosialisasi kepada KSM baru	SARAN DAN BIAYA PROYEK Tempat pelatihan Pemateri Konsumsi		

MATRIKS PERENCANAAN PROYEK 5			
NAMA PROYEK : Perbaikan susunan pengurus		JANGKA WAKTU : 6 bulan	
TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Meningkatkan kinerja Pengurus BKM	INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF: Seluruh pengurus aktif melaksanakan tugasnya	SUMBER-SUMBER PEMBUKTIAN: Ketua BKM	ASUMSI-ASUMSI PENTING:
SASARAN PROYEK: Pengurus BKM Berkah Mulyo	Tercatat sebagai Pengurus BKM Berkah Mulyo	Susunan Pengurus BKM Berkah Mulyo	
MAKSUD PROYEK: Merubah susunan Pengurus BKM Berkah Mulyo	Pelaksanaan rapat untuk membentuk pengurus baru	Daftar hadir rapat dan notulen keputusan rapat	Resistensi terhadap perubahan susunan pengurus
HASIL-HASIL KERJA PROYEK: Perubahan susunan pengurus BKM Berkah Mulyo dan deskripsi kerja	Terdapat susunan pengurus baru	Susunan yang baru Pengurus BKM Berkah Mulyo	
KEGIATAN-KEGIATAN PROYEK: Merubah personalia Pengurus BKM Berkah Mulyo dan membuat deskripsi kerja	SARAN DAN BIAYA PROYEK Tempat rapat Konsumsi		Kesulitan menentukan waktu yang tepat

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Permasalahan kekuranglancaran pengembalian bantuan modal kerja bergulir oleh KSM di BKM Berkah Mulyo dipengaruhi oleh faktor situasional, institusional, dan individual. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan saling mempengaruhi. Faktor situasional yang mempengaruhi faktor kondisi perekonomian yang tidak menentu. Faktor institusional yang mempengaruhi adalah KSM, BKM, Fasilitator Kelurahan, dan masyarakat. Faktor individual yang mempengaruhi adalah kondisi anggota KSM.
2. Intervensi yang dapat dilakukan adalah survey di KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan Pelatihan motivasi dan ketrampilan wirausaha, kewajiban mengikuti pelatihan bagi KSM yang mengajukan permohonan bantuan modal kerja, dan perbaikan susunan pengurus.

Menganalisis permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan dengan metode ZOPP dalam penelitian ini adalah salah satu upaya kontribusi mengatasi permasalahan sosial dalam perspektif psikologi. Oleh karena itu, saran yang diberikan untuk aplikasi dan penelitian lebih lanjut adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan efektivitas dari intervensi yang diajukan sehingga efektivitas metode ZOPP dapat lebih terukur.
2. Metode ZOPP dapat memberikan banyak kesempatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat ketika dipergunakan untuk menganalisis masalah-masalah sosial tetapi beberapa kelemahan, seperti lemahnya fungsi

peran-peran sosial, tingkat representasi dan mental set dari pihak-pihak yang terkait dalam menganalisis, harus lebih diperhatikan.

3. Salah satu faktor individual yang menjadi permasalahan dalam pengembalian bantuan modal kerja bergulir adalah kondisi anggota KSM. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut, misalnya dari variabel *locus of control*, nilai-nilai yang dominan, *adversity quotient*, prokastrinasi, dan lain-lain.●

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Buku Satu: Pedoman Umum, 1999.
- _____. *Kedaulatan Rakyat*. Penanggulangan Kemiskinan. Dillon: Tidak Bisa 'Sambil Lalu'. 19 Juni 2001.
- _____. *Kedaulatan Rakyat*. Tokoh Kita. 28 Juni 2001.
- _____. Lembar Pemantauan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Wirobrajan, Jogjakarta.
- _____. 2001. <http://www.mit.edu>.
- Coleman, J.W., Cresssey, D.R., 1987. *Social Problems* 3rd edition. Harper & Row Publishers: New York.
- Michener, H.A., DeLamater, J.D. 1999. *Social Psychology*. 4th edition. Harcourt Brace College Publishers: Orlando.
- Myers, D.G. 1990. *Social Psychology*. 6th edition. McGraw-Hill College: Michigan.
- Ramdhani, N. 1996. *Pembinaan Jiwa Kewiraswastaan Pemuda Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*. Laporan Penelitian (tidak diterbitkan). Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.

- Shaw, M.E., Costanzo, P.R. 1982. *Theories of Social Psychology*. 2nd edition. McGraw-Hill, Inc: Tokyo.
- Stepan, C.W., Stepan, W.G. 1985. *Two Social Psychologies. An Integrative Approach*. The Dorsey: Illinois.
- Sucipto, Helly. 1999. *Metode Perencanaan Proyek yang Berorientasi pada Tujuan. Buku Panduan Pengayaan Program Profesi Bagian Psikologi Sosial. Program Profesi Bagian Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.*

✦ ✦ ✦